

Implementasi Pembinaan Kemandirian terhadap Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Geraldinho Sitorus¹, Riky Novarizal²

¹Universitas Islam Riau geraldinhositorus@student.uir.ac.id

²Universitas Islam Riau. riky.novarizal@soc.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 16, 2026

Revised May 21, 2026

Accepted June 02, 2026

Available online June 30, 2026

Kata Kunci:

pembinaan kemandirian, warga binaan, lembaga pemasyarakatan

Keywords:

self-reliance development, inmates, correctional institutions

*Corresponding author

E-mail addresses:

geraldinhositorus@student.uir.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan kemandirian warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya kajian yang membahas evaluasi program dan perubahan perilaku dalam pembinaan kemandirian warga binaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian dilaksanakan melalui program keterampilan kerja yang didukung kerja sama dengan pihak eksternal dan pengawasan petugas pemasyarakatan. Evaluasi dilakukan melalui penilaian keterampilan dan perubahan perilaku warga binaan. Kendala yang dihadapi meliputi perbedaan karakter warga binaan dan keterbatasan sarana pendukung. Novelty penelitian ini terletak pada analisis terpadu mengenai program keterampilan, proses evaluasi, dan perubahan perilaku warga binaan. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian pemasyarakatan serta menjadi referensi dalam meningkatkan efektivitas program pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of self-reliance development programs for inmates in correctional institutions. This study is motivated by the limited research examining program evaluation and behavioral changes in inmate self-reliance development. A qualitative approach was employed using interviews and documentation techniques, with data analyzed through NVivo software. The findings reveal that self-reliance development was implemented through vocational skill programs supported by collaboration with external parties and supervision from correctional officers. Program evaluation was conducted through the assessment of inmates' skills and behavioral changes. The obstacles encountered included differences in inmates' characteristics and limited supporting facilities. The novelty of this study lies in its integrated analysis of vocational programs, evaluation processes, and behavioral changes among inmates. This study contributes to the development of correctional studies and serves as a reference for improving the effectiveness of self-reliance development programs in correctional institutions.

1. PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia melalui pelaksanaan fungsi pembinaan terhadap warga binaan. Sistem pemasyarakatan tidak lagi menempatkan narapidana sebagai objek penghukuman semata, melainkan sebagai individu yang perlu dibina agar mampu kembali menjalankan fungsi sosial di masyarakat. Ketentuan tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa tujuan pemasyarakatan diarahkan pada perbaikan diri, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial warga binaan setelah menjalani masa pidana. Konsep pemasyarakatan menunjukkan adanya perubahan paradigma dari sistem kepenjaraan yang bersifat represif menuju sistem pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan pengembangan kualitas individu.

Pembinaan kemandirian merupakan salah satu bentuk implementasi sistem pemasyarakatan yang bertujuan memberikan keterampilan kerja kepada warga binaan. Program pembinaan dilaksanakan melalui berbagai pelatihan keterampilan seperti menjahit, pertanian, kerajinan tangan, serta kegiatan produktif lainnya. Pemberian keterampilan kerja bertujuan untuk membentuk kemandirian ekonomi warga binaan setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan kemandirian menjadi aspek penting dalam mendukung proses reintegrasi sosial karena mantan narapidana sering menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan akibat stigma negatif masyarakat terhadap status mereka sebagai mantan narapidana (Yuliana & Rahmawati, 2022).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembinaan berbasis keterampilan memiliki pengaruh terhadap perubahan perilaku warga binaan. (Putra & Wahyuni, 2023) menyatakan bahwa pelatihan keterampilan kerja mampu meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi warga binaan untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif setelah bebas. Sementara itu, (Nurhadi & Hartono, 2021) menemukan bahwa pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan masih menghadapi keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pelatih profesional, serta kondisi *overcrowding* yang memengaruhi efektivitas program. (Peterson, 2020) menjelaskan bahwa rehabilitasi berbasis keterampilan merupakan strategi penting dalam menurunkan tingkat residivisme warga binaan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembinaan berbasis keterampilan memiliki pengaruh terhadap perubahan perilaku warga binaan. menyatakan bahwa pelatihan keterampilan kerja mampu meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi warga binaan untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif setelah bebas. menemukan bahwa pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan masih menghadapi keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pelatih profesional, serta kondisi *overcrowding* yang memengaruhi efektivitas program. menjelaskan bahwa rehabilitasi berbasis keterampilan merupakan strategi penting dalam menurunkan tingkat residivisme narapidana.

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Ditjenpas tahun 2025, jumlah penghuni pemasyarakatan di Indonesia mencapai 275.504 jiwa. Provinsi Riau juga mengalami peningkatan jumlah warga binaan hingga mencapai 15.936 jiwa, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru tercatat memiliki jumlah penghuni sebanyak 1.502 jiwa pada tahun 2025 (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025). Peningkatan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa persoalan *overcrowding* masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan.

Kondisi *overcrowding* berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan kemandirian dan kualitas rehabilitasi warga binaan. Keterbatasan sarana pelatihan, minimnya tenaga pembina, serta keterbatasan anggaran memengaruhi pelaksanaan program pembinaan secara optimal. Selain itu, kondisi *overcrowding* menyebabkan berkurangnya intensitas pembinaan, terbatasnya pengawasan petugas, serta tidak meratanya kesempatan warga binaan dalam mengikuti program rehabilitasi dan pelatihan keterampilan. Situasi tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan dalam membentuk warga binaan yang mandiri dan siap kembali ke masyarakat. Perspektif kriminologi modern memandang pembinaan keterampilan sebagai bagian dari strategi rehabilitasi sosial yang bertujuan mengurangi kemungkinan pengulangan tindak pidana setelah warga binaan bebas (Putri & Mahendra, 2023).

Konsep tersebut sejalan dengan teori *Reintegrative Shaming* yang dikemukakan oleh John Braithwaite. Teori tersebut menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana memiliki peluang untuk kembali diterima dalam kehidupan sosial apabila memperoleh pembinaan dan kesempatan memperbaiki diri. Pembinaan kemandirian menjadi sarana bagi warga binaan untuk membangun identitas baru melalui kegiatan produktif dan penguasaan keterampilan kerja. Keberhasilan pembinaan tidak hanya berdampak terhadap perubahan individu warga binaan, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan residivisme, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial warga binaan. Namun, kondisi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan dapat menurunkan kualitas rehabilitasi karena terbatasnya sarana pembinaan, tidak seimbangnya rasio petugas dengan jumlah warga binaan, serta berkurangnya efektivitas pengawasan dan pelaksanaan program pelatihan keterampilan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses pembentukan kemandirian, rehabilitasi sosial, serta kesiapan warga binaan untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

Keterbatasan penelitian terdahulu terlihat pada minimnya kajian yang membahas pelaksanaan pembinaan kemandirian dalam kondisi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada efektivitas program pembinaan secara umum tanpa menguraikan secara mendalam mengenai proses pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta dampak *overcrowding* terhadap kualitas rehabilitasi dan kesiapan reintegrasi sosial warga binaan. Penggunaan pendekatan analisis kualitatif berbantuan perangkat lunak NVivo dalam kajian pemasyarakatan juga masih relatif terbatas.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian kriminologi dan pemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial warga binaan. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian secara lebih efektif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap permasalahan *overcrowding* guna mendukung keberhasilan rehabilitasi serta reintegrasi sosial warga binaan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai proses pembinaan, pengalaman warga binaan, serta dinamika pelaksanaan program pembinaan kemandirian di lingkungan pemasyarakatan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan (Creswell & Poth, 2024).

Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga pemasyarakatan tersebut telah melaksanakan berbagai program pembinaan kemandirian bagi warga binaan, seperti pelatihan menjahit, pertanian, kerajinan tangan, dan kegiatan usaha produktif lainnya. Kondisi tersebut dinilai relevan dengan fokus penelitian mengenai pelaksanaan pembinaan kemandirian dalam sistem pemasyarakatan. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, dimulai pada bulan Februari hingga April 2026. Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap selama periode penelitian melalui kegiatan wawancara, observasi lapangan, dan pengumpulan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan pada hari dan jam kegiatan pembinaan berlangsung agar peneliti dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan kondisi empiris di lapangan serta memahami secara langsung pelaksanaan program pembinaan kemandirian terhadap warga binaan.

Informan penelitian ditentukan secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pemahaman terhadap pelaksanaan pembinaan kemandirian. Informan terdiri atas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, Kepala Seksi Pembinaan Kemandirian, petugas pengamanan, serta warga binaan yang mengikuti program pembinaan kemandirian. Warga binaan dipilih berdasarkan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembinaan dan kesediaan memberikan informasi terkait pengalaman selama mengikuti program. Total informan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses pelaksanaan pembinaan, bentuk kegiatan pembinaan, kendala yang dihadapi, serta dampak program terhadap warga binaan. Setiap wawancara berlangsung sekitar 30–60 menit dan dilakukan secara langsung di lingkungan lembaga pemasyarakatan sesuai izin yang diberikan pihak lembaga. Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara, alat perekam suara, serta catatan lapangan untuk mencatat informasi penting, respons informan, dan situasi selama proses wawancara berlangsung.

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas pembinaan, interaksi antara petugas dan warga binaan, serta kondisi sarana pendukung kegiatan pembinaan. Selama observasi, peneliti menggunakan teknik pencatatan berupa *field notes* atau catatan lapangan yang memuat hasil pengamatan mengenai aktivitas pembinaan, kondisi lingkungan, serta dinamika yang terjadi selama penelitian berlangsung. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa arsip kegiatan, foto, laporan pembinaan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik berbantuan perangkat lunak *NVivo*. Proses analisis diawali dengan transkripsi hasil wawancara, dilanjutkan dengan tahap familiarisasi data untuk memahami keseluruhan informasi yang diperoleh. Tahap berikutnya dilakukan proses coding dengan mengelompokkan data ke dalam kategori dan tema tertentu sesuai fokus penelitian. Data yang telah dikodekan dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap warga binaan. Penggunaan *NVivo* membantu peneliti dalam mengorganisasi data secara sistematis sehingga proses analisis menjadi lebih terarah dan terstruktur (Saldaña, 2021).

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian juga menggunakan teknik member check untuk memastikan kesesuaian hasil interpretasi peneliti dengan informasi yang disampaikan oleh informan. Teknik tersebut digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian (Denzin, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil analisis data menggunakan perangkat lunak NVivo menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan berlangsung melalui keterkaitan antara kebijakan pembinaan, perencanaan program, pelaksanaan pelatihan keterampilan, partisipasi warga binaan, dukungan sarana, pengawasan petugas, serta evaluasi program pembinaan. Visualisasi project map memperlihatkan adanya hubungan yang saling berkaitan antar indikator dalam mendukung proses pembinaan kemandirian warga binaan secara terstruktur dan berkelanjutan.

1. Visualisasi Word Cloud Hasil Wawancara

Analisis awal data wawancara menggunakan NVivo 15 menghasilkan *visualisasi word cloud* yang menunjukkan distribusi frekuensi kata dalam penelitian. Kata pembinaan, kemandirian, kegiatan, pelatihan, dan warga binaan muncul dengan intensitas tertinggi. Dominasi kata tersebut menunjukkan bahwa fokus penelitian berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan.

Kemunculan kata pelaksanaan, mengikuti, dan program menunjukkan keterlibatan aktif warga binaan dalam kegiatan pembinaan. Selain itu, kata petugas, masa depan, dan setelah bebas menunjukkan bahwa pembinaan tidak hanya berorientasi pada kegiatan selama menjalani pidana, tetapi juga diarahkan pada kesiapan reintegrasi sosial warga binaan.

Gambar 1. Visualisasi Word Cloud Hasil Wawancara

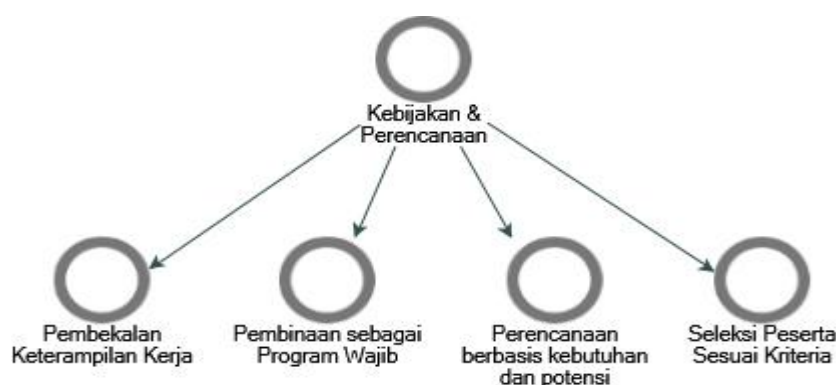


Sumber: Data Diolah Menggunakan NVivo 15, 2026

Berdasarkan Gambar 1, kata pembinaan menjadi kata yang paling dominan, diikuti oleh kata kegiatan, kemandirian, dan pelatihan. Visualisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan kemandirian menjadi fokus utama dalam penelitian dan menjadi dasar dalam proses pengkodean data pada tahap analisis selanjutnya.

2. Kebijakan dan Perencanaan Pembinaan Kemandirian

Gambar 2. Project Map Kebijakan dan Perencanaan Pembinaan Kemandirian



Sumber: Data Diolah Menggunakan NVivo 15, 2026

Berdasarkan Project Map pada Gambar 2, kebijakan dan perencanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru memperlihatkan adanya pola pelaksanaan pembinaan yang sistematis dan berorientasi pada pengembangan kapasitas warga binaan. Keterhubungan antara indikator pembekalan keterampilan kerja, perencanaan berbasis kebutuhan, dan mekanisme seleksi peserta mencerminkan bahwa pembinaan kemandirian telah ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam proses pemasyarakatan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan tidak hanya diarahkan pada pengisian aktivitas selama menjalani masa pidana, tetapi juga difokuskan pada pembentukan kesiapan kerja dan kemampuan adaptasi sosial warga binaan setelah kembali ke masyarakat. Perencanaan program yang mempertimbangkan kebutuhan serta potensi warga binaan memperlihatkan adanya pendekatan pembinaan yang bersifat adaptif dan rehabilitatif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa lembaga pemasyarakatan telah berupaya mengintegrasikan aspek pembinaan keterampilan dengan tujuan reintegrasi sosial warga binaan.

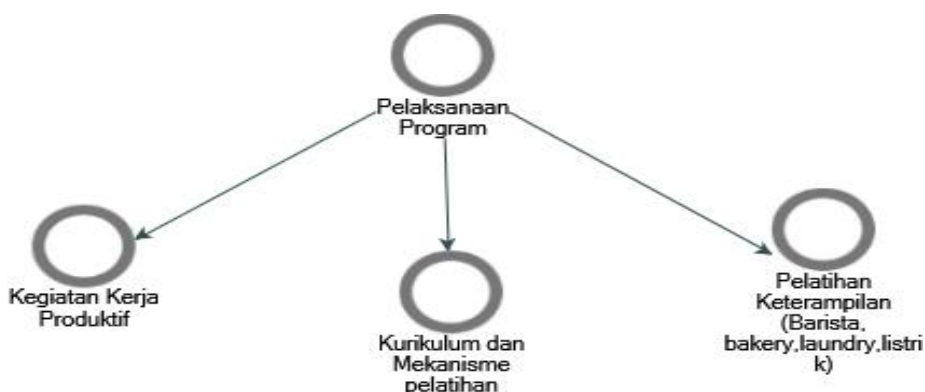
Hasil wawancara dengan Harlem Turnip dan Missiar memperkuat temuan bahwa pelaksanaan pembinaan kemandirian dilakukan melalui tahapan perencanaan, seleksi peserta, serta penyesuaian program berdasarkan kondisi warga binaan. Harlem Turnip menegaskan bahwa pembinaan kemandirian merupakan bagian wajib dalam proses pembinaan warga binaan. "Pembinaan kemandirian itu wajib berjalan sebagai bagian dari proses pembinaan warga binaan."

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya komitmen kelembagaan dalam menjadikan pembinaan kemandirian sebagai bagian utama dari proses pemasyarakatan. Missiar juga menjelaskan bahwa penentuan peserta dilakukan dengan mempertimbangkan masa pidana, minat, dan kemampuan warga binaan agar program yang diberikan lebih efektif dan tepat sasaran. Temuan wawancara tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru tidak hanya berorientasi pada aspek pengamanan, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia warga binaan melalui pendekatan pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

3. Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian

Hasil analisis *NVivo* menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan kemandirian dilakukan melalui pelatihan keterampilan yang bersifat terstruktur dan aplikatif. Program pembinaan diarahkan pada peningkatan keterampilan kerja warga binaan melalui kegiatan pelatihan dan praktik kerja secara langsung.

Gambar 3. *Project Map* Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian



Sumber: Data Diolah Menggunakan *NVivo* 15, 2026

Berdasarkan Project Map pada Gambar 3, pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru menunjukkan pola pembinaan yang sistematis, aplikatif, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja warga binaan. Keterhubungan antara indikator pelatihan keterampilan, kurikulum pembinaan, mekanisme pelatihan, dan kegiatan kerja produktif memperlihatkan bahwa proses pembinaan dilaksanakan melalui pendekatan yang terstruktur serta tidak hanya berfokus pada pemberian materi teoritis. Pelaksanaan pembinaan diarahkan pada penguasaan keterampilan praktis melalui keterlibatan langsung warga binaan dalam kegiatan kerja produktif. Variasi program seperti barista, bakery, laundry, typing kantor, dan perbaikan listrik menunjukkan adanya upaya lembaga dalam menyesuaikan program pembinaan dengan kebutuhan kerja dan potensi warga binaan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pembinaan kemandirian telah diarahkan pada penguatan kompetensi kerja sebagai bagian dari proses rehabilitasi sosial warga binaan.

Keberadaan kurikulum dan mekanisme pelatihan juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan tidak dilakukan secara spontan, tetapi mengacu pada pedoman tertentu yang mendukung efektivitas proses pembelajaran keterampilan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembinaan kemandirian tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas rutin di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesiapan kerja dan peningkatan produktivitas warga binaan setelah bebas nantinya. Hasil wawancara dengan Missiar serta beberapa warga binaan memperkuat temuan bahwa pelaksanaan pembinaan dilakukan melalui kegiatan pelatihan yang terarah dan berbasis praktik kerja langsung. Missiar menjelaskan bahwa sebelum mengikuti kegiatan pembinaan, warga binaan terlebih dahulu melalui proses seleksi dan pembinaan awal agar program yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kesiapan peserta. "Penempatan kegiatan sangat ditentukan berdasarkan minat dan kemampuan warga binaan."

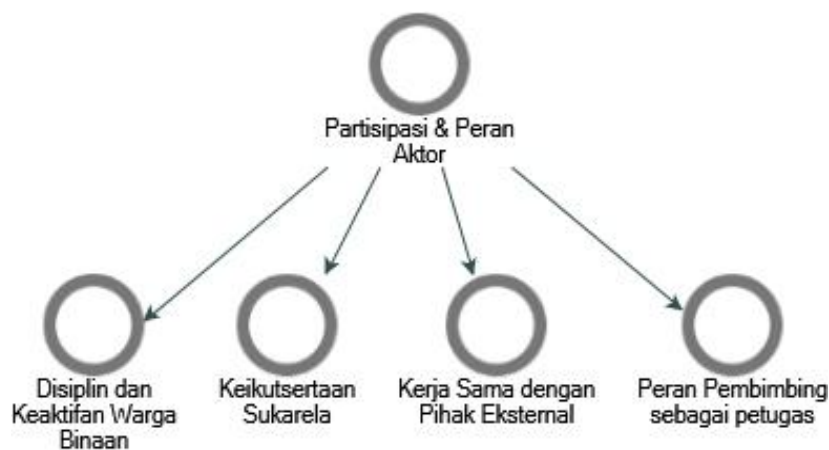
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan mempertimbangkan aspek kesesuaian kemampuan dan minat warga binaan sehingga proses pembelajaran keterampilan dapat berjalan lebih optimal. Arkana Mahesa menjelaskan bahwa kegiatan bakery memberikan pengalaman dalam pembuatan roti dan kue, sedangkan Elvano Pradipta menyampaikan bahwa kegiatan barista meningkatkan keterampilan dalam meracik kopi dan pelayanan. Naufal Ghibran menyatakan bahwa kegiatan laundry memberikan keterampilan kerja yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sementara Zafran Alfarezi menjelaskan bahwa kegiatan perbaikan listrik meningkatkan kemampuan teknis dan rasa percaya diri dalam bidang kelistrikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan memberikan dampak terhadap peningkatan keterampilan praktis, pengalaman kerja, dan kesiapan warga binaan dalam menghadapi kehidupan setelah bebas.

Secara keseluruhan, hasil wawancara memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembinaan kemandirian telah berjalan secara aktif, terarah, dan berorientasi pada pembentukan kompetensi kerja warga binaan. Kondisi ini menunjukkan adanya transformasi fungsi lembaga pemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek pengamanan, tetapi juga pada pengembangan kualitas sumber daya manusia warga binaan melalui pembinaan keterampilan kerja yang berkelanjutan.

4. Partisipasi Warga Binaan dan Peran Aktor

Hasil analisis data menggunakan NVivo menunjukkan bahwa partisipasi warga binaan dan peran aktor dalam pembinaan kemandirian memiliki hubungan yang saling mendukung. Project map memperlihatkan keterkaitan antara keikutsertaan sukarela, disiplin dan keaktifan warga binaan, peran petugas pembinaan, serta kerja sama dengan pihak eksternal dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian.

Gambar 4. *Project Map* Partisipasi Warga Binaan dan Peran Aktor



Sumber: Data Diolah Menggunakan NVivo 15, 2026

Berdasarkan Project Map pada Gambar 4, partisipasi warga binaan dan peran aktor dalam pembinaan kemandirian menunjukkan adanya pola hubungan yang saling mendukung dalam pelaksanaan program pembinaan. Keterhubungan antara indikator keikutsertaan sukarela, disiplin dan keaktifan warga binaan, peran petugas pembinaan, serta kerja sama dengan pihak eksternal mencerminkan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya dipengaruhi oleh program yang tersedia, tetapi juga oleh keterlibatan berbagai pihak dalam proses pelaksanaannya.

Keikutsertaan warga binaan secara sukarela menunjukkan adanya kesadaran dan motivasi internal untuk mengikuti pembinaan sebagai sarana pengembangan diri. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa warga binaan tidak lagi diposisikan sebagai objek pembinaan semata, tetapi turut menjadi subjek aktif dalam proses peningkatan keterampilan dan perubahan perilaku. Disiplin dan keaktifan warga binaan juga menunjukkan adanya perubahan sikap yang mendukung terciptanya proses pembinaan yang lebih kondusif.

Peran petugas pembinaan memperlihatkan fungsi pengawasan, pembimbingan, dan pengendalian selama kegiatan berlangsung. Selain itu, keterlibatan pihak eksternal seperti dinas terkait dan Balai Latihan Kerja (BLK) menunjukkan adanya dukungan kelembagaan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan. Kehadiran pihak eksternal memberikan kontribusi dalam bentuk pelatihan, transfer keterampilan, serta penguatan kompetensi kerja warga binaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan unsur internal dan eksternal lembaga pasyarakatan. Kondisi ini mencerminkan bahwa efektivitas pembinaan dipengaruhi oleh sinergi antara partisipasi aktif warga binaan, dukungan petugas, dan kerja sama kelembagaan dalam proses pembinaan.

Hasil wawancara dengan Renaldo, Missiar, serta beberapa warga binaan memperlihatkan bahwa partisipasi warga binaan dalam kegiatan pembinaan tergolong tinggi dan dilakukan atas dasar kemauan sendiri. Renaldo menjelaskan bahwa warga binaan yang mengikuti kegiatan pembinaan merupakan peserta yang telah melalui proses seleksi berdasarkan kedisiplinan dan kesiapan mengikuti kegiatan. "Warga binaan pada umumnya mengikuti kegiatan dengan tertib dan disiplin."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kedisiplinan menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan pembinaan. Elvano Pradipta, Naufal Ghibran, dan Zafran Alfarezi juga menyampaikan bahwa keikutsertaan mereka dalam program pembinaan dilakukan atas dasar keinginan sendiri untuk memperoleh keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah bebas nanti. Missiar menjelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan melibatkan kerja sama dengan pihak eksternal seperti dinas terkait, Balai Latihan Kerja (BLK), serta tutor yang memiliki kompetensi sesuai bidang pelatihan. Keterlibatan pihak eksternal tersebut memperlihatkan adanya upaya peningkatan kualitas pembinaan melalui dukungan tenaga pelatih profesional dan kurikulum pelatihan yang lebih terarah.

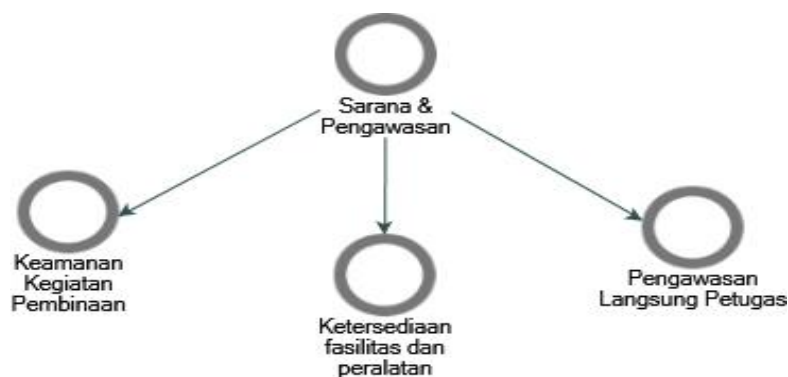
Temuan wawancara menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan kemandirian dipengaruhi oleh tingginya partisipasi warga binaan, peran aktif petugas pembinaan, serta dukungan kerja sama kelembagaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa proses pembinaan berjalan secara partisipatif dan kolaboratif dalam mendukung peningkatan kualitas pembinaan warga binaan di Lembaga Pasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

5. Sarana dan Pengawasan dalam Pembinaan Kemandirian

Sarana dan pengawasan merupakan komponen penting dalam mendukung keberlangsungan program pembinaan kemandirian di lembaga pasyarakatan. Ketersediaan fasilitas yang memadai serta pengawasan yang terarah berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan pembinaan. Dukungan sarana memungkinkan kegiatan pelatihan berjalan sesuai kebutuhan program, sedangkan pengawasan berfungsi menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Hasil analisis data menggunakan NVivo menunjukkan bahwa sarana dan pengawasan menjadi unsur penting dalam mendukung pelaksanaan pembinaan kemandirian warga binaan. Project map memperlihatkan hubungan antara ketersediaan fasilitas dan peralatan, pengawasan langsung petugas, serta keamanan kegiatan pembinaan.

Gambar 5. *Project Map* Sarana dan Pengawasan Pembinaan Kemandirian



Sumber: Data Diolah Menggunakan NVivo 15, 2026

Berdasarkan *Project Map* pada Gambar 5, sarana dan pengawasan memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Keterhubungan antara indikator fasilitas dan peralatan, pengawasan langsung petugas, serta keamanan kegiatan pembinaan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan memerlukan dukungan sarana yang memadai dan sistem pengawasan yang terarah.

Ketersediaan fasilitas dan peralatan kerja mendukung pelaksanaan berbagai jenis pelatihan keterampilan yang bersifat praktis dan produktif. Sarana yang memadai memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk memperoleh pengalaman kerja yang lebih realistis sesuai dengan bidang keterampilan yang diikuti. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan fasilitas pembinaan tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung kegiatan, tetapi juga sebagai media pembelajaran keterampilan kerja bagi warga binaan. Pengawasan langsung petugas menunjukkan adanya fungsi kontrol terhadap seluruh aktivitas pembinaan guna menjaga ketertiban, keamanan, dan kepatuhan warga binaan selama kegiatan berlangsung. Pengawasan juga berfungsi mengurangi potensi pelanggaran serta memastikan penggunaan alat kerja dilakukan sesuai prosedur keamanan. Aspek keamanan dalam kegiatan pembinaan memperlihatkan adanya perhatian lembaga terhadap keselamatan warga binaan dalam pelaksanaan kegiatan kerja produktif.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sarana dan pengawasan merupakan dua komponen yang saling mendukung dalam menciptakan kondisi pembinaan yang aman, tertib, dan kondusif. Efektivitas pembinaan kemandirian tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas program pelatihan, tetapi juga oleh dukungan fasilitas dan pengawasan yang memadai selama proses pembinaan berlangsung.

Hasil wawancara dengan Harlem Turnip, Renaldo, serta beberapa warga binaan memperlihatkan bahwa fasilitas dan pengawasan dalam kegiatan pembinaan sudah cukup mendukung pelaksanaan program pembinaan kemandirian. Harlem Turnip menjelaskan bahwa setiap kegiatan pembinaan selalu berada dalam pengawasan langsung petugas untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai aturan yang berlaku. "Setiap kegiatan pasti ada petugas yang memantau."

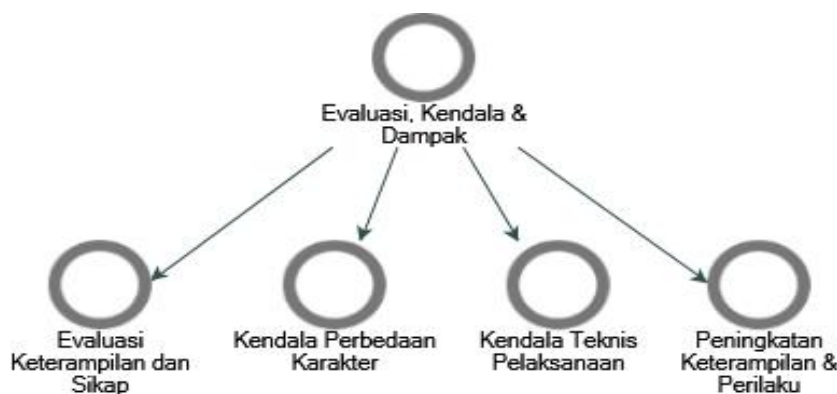
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembinaan guna menjaga ketertiban dan keamanan selama kegiatan berlangsung. Renaldo juga menjelaskan bahwa warga binaan menggunakan peralatan kerja yang memadai dan dilengkapi perlengkapan keselamatan kerja sehingga risiko gangguan keamanan dapat diminimalisir. Beberapa warga binaan seperti Arkana Mahesa, Naufal Ghibran, dan Zafran Alfarezi menyampaikan bahwa fasilitas dan peralatan yang tersedia sudah cukup baik dan mendukung proses pelatihan keterampilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sarana pembinaan memberikan pengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja produktif di dalam lembaga pemasyarakatan.

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa dukungan sarana dan pengawasan yang baik berpengaruh terhadap terciptanya suasana pembinaan yang lebih tertib, aman, dan kondusif. Kondisi tersebut memperkuat pelaksanaan pembinaan kemandirian sebagai bagian dari proses rehabilitasi sosial dan pengembangan kemampuan kerja warga binaan.

6. Evaluasi, Kendala, dan Dampak Pembinaan Kemandirian

Hasil analisis data menggunakan NVivo menunjukkan bahwa evaluasi, kendala, dan dampak pembinaan memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian warga binaan. Project map memperlihatkan keterkaitan antara evaluasi keterampilan dan sikap, kendala pelaksanaan, serta peningkatan keterampilan dan perilaku warga binaan.

Gambar 6. Project Map Evaluasi, Kendala, dan Dampak Pembinaan Kemandirian



Sumber: Data Diolah Menggunakan NVivo 15, 2026

Berdasarkan Project Map pada Gambar 6, evaluasi, kendala, dan dampak pembinaan memiliki keterkaitan yang kuat dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian warga binaan. Keterhubungan antara indikator evaluasi keterampilan dan sikap, kendala pelaksanaan, serta peningkatan keterampilan dan perilaku warga binaan menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam melakukan evaluasi dan mengelola hambatan pelaksanaan program.

Evaluasi pembinaan dilakukan untuk menilai perkembangan kemampuan kerja, kedisiplinan, tanggung jawab, dan perubahan perilaku warga binaan selama mengikuti kegiatan pembinaan. Evaluasi menjadi instrumen penting dalam mengukur keberhasilan program serta mengetahui sejauh mana pembinaan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas diri warga binaan. Kendala pelaksanaan pembinaan memperlihatkan adanya hambatan yang berasal dari perbedaan karakter, tingkat kemampuan, motivasi, dan kedisiplinan warga binaan. Perbedaan tersebut memengaruhi proses pelaksanaan pembinaan sehingga diperlukan pendekatan yang adaptif dan pengawasan yang lebih intensif dari petugas pembinaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian tidak hanya berkaitan dengan proses pelatihan keterampilan, tetapi juga menyangkut pengelolaan perilaku dan penyesuaian sosial warga binaan selama menjalani pembinaan.

Di sisi lain, pembinaan memberikan dampak positif terhadap peningkatan keterampilan kerja dan perubahan perilaku warga binaan. Program pembinaan mendorong warga binaan menjadi lebih aktif, disiplin, produktif, dan memiliki kesiapan kerja yang lebih baik. Temuan ini menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian berfungsi sebagai sarana rehabilitasi sosial yang mendukung perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas warga binaan sebelum kembali ke masyarakat.

Hasil wawancara dengan Harlem Turnip, Missiar, Renaldo, serta beberapa warga binaan memperlihatkan bahwa evaluasi pembinaan dilakukan melalui pengamatan terhadap kemampuan kerja, hasil praktik, sikap, dan kedisiplinan warga binaan selama mengikuti kegiatan pembinaan. Missiar menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan melalui ujian praktik maupun penilaian langsung terhadap kemampuan peserta pelatihan. Renaldo menjelaskan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan pembinaan berasal dari perbedaan perilaku dan karakter warga binaan sehingga petugas perlu memberikan pendekatan yang berbeda terhadap masing-masing peserta pembinaan. "Kendala yang dihadapi lebih kepada perbedaan perilaku antar warga binaan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan memerlukan kemampuan pengelolaan sosial dan pengawasan yang baik agar kegiatan dapat berjalan secara kondusif. Harlem Turnip juga menjelaskan bahwa kendala lain berkaitan dengan pembagian waktu, pengawasan, dan penyesuaian warga binaan terhadap kegiatan pembinaan. Beberapa warga binaan seperti Elvano Pradipta, Naufal Ghibran, dan Zafran Alfarezi mengaku mengalami peningkatan keterampilan, rasa percaya diri, dan perubahan sikap setelah mengikuti program pembinaan. Warga binaan merasa lebih terarah serta memiliki harapan untuk memanfaatkan keterampilan tersebut setelah bebas nanti. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa pembinaan kemandirian memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan kerja dan perubahan perilaku warga binaan meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan sosial dalam proses pembinaan.

7. Pengembangan Program Pembinaan Kemandirian

Hasil analisis data menggunakan *NVivo* menunjukkan bahwa pengembangan program pembinaan kemandirian dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan pembinaan warga binaan. Project map memperlihatkan hubungan antara pengembangan variasi program, peningkatan kualitas pelatihan, peningkatan fasilitas, serta orientasi kemandirian warga binaan setelah bebas.

Gambar 7. *Project Map* Pengembangan Program Pembinaan Kemandirian



Sumber: Data Diolah Menggunakan *NVivo* 15, 2026

Berdasarkan Project Map pada Gambar 7, pengembangan program pembinaan kemandirian dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan variasi program, kualitas pelatihan, dan dukungan fasilitas pembinaan. Keterhubungan antara indikator pengembangan variasi program, peningkatan kualitas pelatihan, peningkatan fasilitas, serta orientasi kemandirian warga binaan setelah bebas menunjukkan bahwa pengembangan program diarahkan pada peningkatan efektivitas pembinaan dan kesiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat.

Pengembangan variasi program memperlihatkan adanya kebutuhan untuk memperluas jenis kegiatan pembinaan sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan kebutuhan kerja masyarakat. Penambahan jenis pelatihan memberikan peluang yang lebih luas bagi warga binaan untuk memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian telah diarahkan pada penguatan kapasitas kerja dan peningkatan daya saing warga binaan setelah bebas nanti. Peningkatan kualitas pelatihan dilakukan melalui penyempurnaan kurikulum, peningkatan kompetensi pembimbing, serta penguatan metode pelatihan yang lebih aplikatif. Selain itu, peningkatan fasilitas pembinaan menunjukkan pentingnya dukungan sarana dan peralatan kerja yang memadai dalam menunjang efektivitas proses pelatihan keterampilan.

Orientasi pembinaan terhadap kemandirian warga binaan setelah bebas menunjukkan bahwa tujuan utama pembinaan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas selama menjalani masa pidana, tetapi juga menyangkut kesiapan sosial, mental, dan ekonomi warga binaan ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan program pembinaan menjadi bagian strategis dalam memperkuat fungsi rehabilitasi sosial lembaga pemasyarakatan.

Hasil wawancara dengan seluruh informan memperlihatkan bahwa pengembangan program pembinaan masih perlu dilakukan agar manfaat yang diperoleh warga binaan menjadi lebih optimal. Harlem Turnip menyampaikan harapan agar program pembinaan dapat terus berkembang dari segi jenis kegiatan maupun fasilitas yang tersedia sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi warga binaan. "Ke depan kita ingin lebih banyak lagi program yang bisa memberi manfaat nyata bagi warga binaan." Missiar menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pelatihan dan pengembangan variasi kegiatan menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pembinaan. Rangga Adhikari juga menyampaikan harapan agar program pembinaan lebih dikembangkan melalui penambahan variasi kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan kerja saat ini.

Beberapa warga binaan seperti Elvano Pradipta, Zafran Alfarezi, dan Naufal Ghibran berharap agar keterampilan yang diperoleh dari kegiatan pembinaan dapat menjadi bekal kerja dan peluang usaha setelah bebas nanti. Harapan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian telah memberikan motivasi kepada warga binaan untuk memiliki kehidupan yang lebih mandiri setelah selesai menjalani masa pidana. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa pengembangan program pembinaan kemandirian menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pembinaan, memperluas keterampilan kerja warga binaan, serta memperkuat kesiapan sosial dan ekonomi warga binaan ketika kembali ke masyarakat.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dilaksanakan secara sistematis melalui kebijakan, perencanaan, pelaksanaan pelatihan, pengawasan, evaluasi, serta pengembangan program yang saling berkaitan. Pembinaan kemandirian ditempatkan sebagai bagian penting dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan membentuk kemampuan kerja, kedisiplinan, serta kesiapan sosial warga binaan setelah kembali ke masyarakat. Temuan ini sejalan dengan konsep pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo (1963) bahwa pembedaan tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga diarahkan pada proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan pembinaan dilaksanakan melalui program wajib yang disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi warga binaan. Program pembinaan tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas rutin di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga diarahkan pada pembentukan keterampilan yang memiliki nilai ekonomis. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Hidayat (2021) yang menyatakan bahwa pembinaan keterampilan kerja menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesiapan warga binaan menghadapi kehidupan sosial setelah bebas. Penelitian Ramadhan dan Putri (2022) juga menjelaskan bahwa pelatihan kerja yang bersifat aplikatif mampu meningkatkan kemampuan adaptasi sosial dan peluang kerja mantan warga binaan.

Pelaksanaan program pembinaan dilakukan melalui berbagai jenis pelatihan, seperti barista, bakery, laundry, administrasi perkantoran, dan kelistrikan. Program tersebut menunjukkan adanya orientasi pembinaan yang bersifat produktif dan praktis. Temuan ini sejalan dengan teori rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan yang menempatkan pelatihan keterampilan sebagai sarana perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas individu. Penelitian Siregar (2020) menjelaskan bahwa pembinaan berbasis keterampilan kerja memiliki pengaruh terhadap peningkatan produktivitas, kedisiplinan, serta rasa percaya diri warga binaan. Dalam penelitian ini, warga binaan tidak hanya memperoleh materi pembelajaran, tetapi juga terlibat secara langsung dalam praktik kerja sehingga pengalaman yang diperoleh mendekati kondisi nyata di dunia kerja.

Partisipasi warga binaan dalam kegiatan pembinaan menunjukkan tingkat keterlibatan yang cukup baik. Keikutsertaan yang bersifat sukarela mencerminkan adanya motivasi internal untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa warga binaan memiliki kesadaran terhadap pentingnya keterampilan sebagai bekal kehidupan setelah bebas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Firmansyah (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembinaan sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan kesiapan individu dalam mengikuti program. Selain itu, kedisiplinan dan keaktifan warga binaan selama kegiatan berlangsung memperlihatkan adanya perubahan pola perilaku yang lebih terarah dan produktif.

Peran petugas pembinaan dan pihak eksternal menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pembinaan kemandirian. Petugas tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan arahan, pendampingan, serta pembimbingan selama proses pelatihan berlangsung. Keterlibatan pihak eksternal, seperti pelatih profesional dan lembaga pelatihan kerja, menunjukkan bahwa pembinaan dilaksanakan melalui kerja sama yang bersifat kolaboratif. Temuan ini mendukung penelitian Wahyuni dan Prasetyo (2022) yang menyatakan bahwa sinergi antara lembaga pemasyarakatan dan pihak eksternal dapat meningkatkan kualitas pembinaan keterampilan warga binaan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sarana dan pengawasan menjadi unsur penting dalam mendukung pelaksanaan pembinaan kemandirian. Ketersediaan fasilitas dan peralatan memungkinkan kegiatan pembinaan berjalan secara optimal, sedangkan pengawasan langsung petugas berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan tidak hanya ditentukan oleh program pelatihan, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sarana serta sistem pengawasan yang memadai. Penelitian Maulana (2021) menjelaskan bahwa fasilitas kerja dan pengawasan yang baik memiliki pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Evaluasi pembinaan dilakukan melalui penilaian keterampilan dan perubahan perilaku warga binaan. Penilaian tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga mencakup kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan diukur secara menyeluruh, baik dari aspek kemampuan kerja maupun perubahan perilaku sosial. Penelitian Arifin (2020) menyatakan bahwa evaluasi berbasis keterampilan dan perilaku lebih efektif dalam mengukur keberhasilan program rehabilitasi warga binaan dibandingkan evaluasi administratif semata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan memberikan dampak positif terhadap peningkatan keterampilan, kedisiplinan, serta kesiapan kerja warga binaan. Warga binaan mengalami perubahan perilaku yang lebih produktif dan memiliki orientasi terhadap kehidupan setelah bebas. Keterampilan yang diperoleh selama pembinaan dipandang memiliki relevansi dengan kebutuhan pekerjaan di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian memiliki kontribusi terhadap proses reintegrasi sosial dan kesiapan ekonomi warga binaan setelah menjalani masa pidana.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru telah dilaksanakan secara terstruktur melalui hubungan antara kebijakan, pelaksanaan pelatihan, partisipasi warga binaan, pengawasan, evaluasi, serta pengembangan program. Seluruh aspek tersebut saling mendukung dalam membentuk keterampilan kerja, perubahan perilaku, dan kesiapan sosial warga binaan. Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya mengenai pentingnya pembinaan berbasis keterampilan dalam sistem pemasyarakatan sekaligus menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan setelah bebas.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dilaksanakan secara terstruktur melalui kebijakan, pelaksanaan pelatihan, pengawasan, evaluasi, dan pengembangan program yang saling berkaitan. Program pembinaan diarahkan pada pembentukan keterampilan kerja, perubahan perilaku, serta kesiapan sosial warga binaan setelah bebas. Pelatihan yang diberikan bersifat aplikatif dan produktif, seperti barista, bakery, laundry, administrasi perkantoran, dan kelistrikan, sehingga mampu memberikan pengalaman kerja yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi warga binaan dalam kegiatan pembinaan tergolong aktif dan didukung oleh peran petugas serta kerja sama dengan pihak eksternal. Ketersediaan fasilitas dan pengawasan langsung dari petugas menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas dan keamanan pelaksanaan program. Evaluasi pembinaan dilakukan melalui penilaian terhadap keterampilan kerja, kedisiplinan, tanggung jawab, dan perubahan perilaku warga binaan selama mengikuti kegiatan.

Program pembinaan kemandirian memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan kerja, kedisiplinan, rasa percaya diri, serta kesiapan warga binaan dalam menghadapi kehidupan setelah bebas. Namun demikian, pelaksanaan pembinaan masih menghadapi hambatan berupa perbedaan karakter warga binaan, pengaturan waktu kegiatan, serta keterbatasan sarana tertentu. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di satu lembaga pemasyarakatan dengan jumlah informan yang terbatas sehingga hasil penelitian bersifat kontekstual.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan penguatan program pembinaan melalui peningkatan kualitas pelatihan, pengembangan variasi kegiatan, optimalisasi fasilitas, serta penguatan kerja sama dengan pihak eksternal.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian dan melibatkan lebih banyak informan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pembinaan kemandirian warga binaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2020). Evaluasi program rehabilitasi berbasis keterampilan terhadap warga binaan masyarakat. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 9(2), 88–101.
- Firmansyah, R. (2023). Partisipasi warga binaan dalam program pembinaan keterampilan di lembaga masyarakat. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 12(1), 55–68.
- Hidayat, A. (2021). Pembinaan keterampilan kerja sebagai upaya reintegrasi sosial narapidana. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(2), 120–134.
- Maulana, F. (2021). Pengaruh fasilitas dan pengawasan terhadap efektivitas pembinaan narapidana. *Jurnal Ilmu Masyarakat*, 10(1), 41–53.
- Nurhadi, A., & Hartono, B. (2021). Kendala pelaksanaan pembinaan warga binaan dalam kondisi overcrowding di lembaga masyarakat. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 201–215.
- Peterson, R. (2020). Skill-based rehabilitation and recidivism reduction among inmates. *Journal of Correctional Education*, 71(2), 77–91.
- Putra, R., & Wahyuni, D. (2023). Pengaruh pelatihan keterampilan terhadap motivasi dan kepercayaan diri warga binaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Masyarakat*, 8(2), 97–110.
- Putri, F., & Mahendra, A. (2023). Rehabilitasi sosial melalui pembinaan keterampilan di lembaga masyarakat. *Jurnal Kriminologi dan Keadilan*, 15(1), 66–81.
- Ramadhan, T., & Putri, N. (2022). Pelatihan kerja dan kesiapan reintegrasi sosial mantan narapidana. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 13(1), 90–104.
- Siregar, H. (2020). Pembinaan berbasis keterampilan kerja dalam meningkatkan produktivitas warga binaan. *Jurnal Masyarakat dan Rehabilitasi Sosial*, 7(2), 73–85.
- Wahyuni, D., & Prasetyo, A. (2022). Kolaborasi lembaga masyarakat dan pihak eksternal dalam pembinaan warga binaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 150–163.
- Yuliana, R., & Rahmawati, N. (2022). Stigma sosial mantan narapidana dan tantangan reintegrasi sosial. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 18(1), 45–59.

Buku

- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. New York: Routledge.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Kartono, K. (2014). *Patologi sosial 2: Kenakalan remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Siegel, L. J. (2020). *Criminology: Theories, patterns, and typologies* (13th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of criminology* (4th ed.). Philadelphia: J.B. Lippincott.
- Willis, S. S. (2017). *Konseling keluarga (Family counseling)*. Bandung: Alfabeta.